


KLIPING BERITA

Sumber : Lombok Post

06 Januari 2023

NTB

Terkait Temuan BPK, Policy Plus Minta Gubernur Awasi Kerja Bawahannya

Editor: Redaksi 5  6 Januari 2023



Direktur Policy Plus Adhar Hakim (Dok/Lombok Post)

MATARAM-Gubernur NTB Zulkieflimansyah diminta mengawasi anak buahnya lebih ketat. Apalagi setelah adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proyek pembangunan dan percepatan jalan.

"Sebagai atasan langsung harus diperbaiki apa yang jadi rekomendasi BPK. Masa' kesalahan mendasar berulang terjadi," kritik Direktur Policy Plus Adhar Hakim.

Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap proyek percepatan dan pembangunan jalan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), terdapat sejumlah temuan. Seperti kekurangan volume pekerjaan, kelebihan bayar, hingga adanya dugaan pelaporan kegiatan fiktif.

Adanya masalah kekurangan volume pekerjaan inilah yang disebut Adhar sebagai kesalahan dasar. Yang mirisnya kerap terjadi. Padahal dalam setiap pekerjaan fisik terdapat pengawasan yang merupakan satu kesatuan dengan pelaksana pekerjaan.

"Satu kesatuan, mestinya sudah rutin. Kecuali ada niat buruk, lain lagi masalahnya," ujarnya.

Adhar mengatakan, audit yang dilakukan BPK terhadap program pembangunan dan percepatan jalan Pemprov NTB berdasarkan pertimbangan tertentu. Misalnya soal perbaikan pelayanan akses transportasi dan pemukiman yang selama ini sangat dibutuhkan. Akses yang mudah bisa menunjang pertumbuhan ekonomi.

Adanya temuan BPK terhadap proyek tersebut, mengindikasikan masalah pengawasan dan evaluasi dari Pemprov NTB. Khususnya pelaksana proyek, yakni Dinas PUPR. Apalagi sebagian pendanaannya merupakan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

"LHP dari BPK itu secara substansi menunjukkan potensi penyimpangan pelaksanaan proyek," kata Adhar yang sebelumnya menjadi Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB.

Karakter audit dari pemeriksaan BPK bertumpu pada eksekusi pembiayaan pembangunan infrastruktur. Berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang menyorot administrasi belanja dan pelaksanaan proyek.

Karena itu, substansi temuan BPK harus segera ditindaklanjuti. Tujuannya menghindari tidak tepatnya waktu penyelesaian proyek serta potensi penyalahgunaan belanja anggaran.

Temuan BPK, kata Adhar, berkelindan dengan administrasi penyelesaian dan pembayaran proyek. Yang seharusnya telah detail diatur. Adanya kekurangan volume maupun keterlambatan pekerjaan, harus menjadi perhatian serius. "Gubernur harus memperbaiki benar-benar hal seperti ini," tandas Adhar.

Sementara itu, Sekda NTB Lalu Gita Ariadi menyebut pemprov melalui Inspektorat masih mempelajari temuan dari BPK. Mengkaji setiap temuan yang ada di dalam LHP. "Kami cek dan pasti akan ditindaklanjuti apa yang direkomendasikan," kata Gita. **(dit/r5)**